

STRATEGI PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG DALAM PEMULIHAN EKONOMI PASCA BENCANA BANJIR BANDANG

PADANG PANJANG CITY GOVERNMENT'S STRATEGY IN ECONOMIC RECOVERY AFTER THE FLASH FLOOD DISASTER

Raisa Adilla^{1*}, Adil Mubarak²

Universitas Negeri Padang, Indonesia

*Email Correspondence: raisaadilla020@gmail.com

Abstract

Padang Panjang is a transit city in West Sumatra that frequently experiences rain and is located in a mountainous area. The city has faced economic challenges following the eruption of Mount Marapi on December 3, 2023, and the flash flood in Lembah Anai on May 11, 2024. These disasters cut off the national Padang–Bukittinggi route and disrupted the trade, services, and small business sectors. This study examines the efforts of the Padang Panjang City Government to recover its economy. The research method involved interviews with 16 individuals from various agencies, including Bappeda, City Hall, the Department of Trade, BPBD, disaster response groups, and flood-affected communities. Data were collected from interviews and documents. The results show that the recovery strategy focuses on trade and small businesses. The implementation of these strategies involves inter-agency collaboration, capital assistance, low-cost market operations, infrastructure repairs, and interest subsidies. However, the recovery has not been evenly distributed. Regional revenues in 2024 failed to meet the target, some workers were laid off, small business sales declined, and the distribution of goods was temporarily hampered. Supporting factors for recovery are inter-agency cooperation, budgetary support, and competence of human resources. Obstacles include dependence on aid and issues with access/logistics. This study recommends improving connectivity, expanding small business programs, simplifying interest subsidies, increasing economic literacy among residents, and implementing results-based evaluations to strengthen the city's economic resilience.

Keywords: *economic recovery, flash flood, strategic management, local policy.*

Abstrak

Padang Panjang adalah kota transit di Sumatera Barat yang sering mengalami hujan dan terletak di wilayah pegunungan. Kota ini menghadapi masalah ekonomi setelah letusan Gunung Marapi pada 3 Desember 2023 dan banjir bandang di Lembah Anai pada 11 Mei 2024. Bencana ini memutus jalur nasional Padang–Bukittinggi dan mengganggu sektor perdagangan, jasa, serta usaha kecil. Penelitian ini meneliti upaya Pemerintah Kota Padang Panjang dalam memulihkan ekonomi. Metode penelitian melibatkan wawancara dengan 16 individu dari berbagai instansi, termasuk Bappeda, Balai Kota, Dinas Perdagangan, BPBD, kelompok siaga bencana, dan masyarakat terdampak banjir. Data diperoleh dari wawancara dan dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi pemulihan berfokus pada perdagangan dan usaha kecil. Pelaksanaan strategi ini melibatkan kerjasama antar instansi, bantuan modal, operasi pasar murah, perbaikan infrastruktur, dan subsidi bunga. Namun, pemulihan belum merata. Pendapatan daerah tahun 2024 tidak mencapai target, beberapa pekerja dirumahkan, penjualan usaha kecil menurun, dan distribusi barang sempat terhambat. Faktor pendukung pemulihan adalah kerjasama antar instansi, dukungan anggaran, dan kompetensi sumber daya manusia. Hambatannya adalah ketergantungan pada bantuan dan masalah akses/logistik. Studi ini merekomendasikan perbaikan konektivitas, perluasan program usaha kecil, penyederhanaan subsidi bunga, peningkatan literasi ekonomi warga, dan evaluasi berbasis hasil untuk meningkatkan ketahanan ekonomi kota.

Kata kunci: pemulihan ekonomi, UMKM, manajemen strategi, kebijakan daerah.

PENDAHULUAN

Padang Panjang, yang terletak di Provinsi Sumatera Barat, memiliki iklim yang sejuk, curah hujan tinggi, dan topografi pegunungan, sehingga wilayah ini rentan terhadap bencana alam. Berdasarkan Undang-Undang No. 24/2007, bencana alam didefinisikan sebagai peristiwa yang disebabkan oleh faktor alam, termasuk gempa bumi, tsunami, letusan gunung berapi, banjir, kekeringan, angin siklon, dan tanah longsor. Banjir terjadi ketika air sungai meluap, mengganggu kehidupan masyarakat serta menyebabkan korban jiwa, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis (Paimin et al., 2009). Banjir bandang, yang terjadi secara tiba-tiba akibat tersumbatnya sungai atau akibat deforestasi, membawa aliran deras yang membawa batu, tanah, dan kayu dari hulu hingga menyebabkan kerusakan pada pemukiman (Purwastuti, 2019).

Gunung Marapi meletus pada minggu, 3 Desember 2023 pukul 14.54 WIB, menyebabkan abu vulkanik yang menimbun kota-kota terdekat seperti Bukittinggi dan Padang Panjang. Gunung Marapi masih aktif mengeluarkan abu vulkanik. Akibat letusan ini, banjir bandang terjadi di kawasan Lembah Anai Kabupaten Tanah Datar pada 11 Mei 2024. Banjir menyebabkan jalan nasional Padang-Bukittinggi terputus total dan kerusakan bangunan serta rumah warga. Masyarakat Padang Panjang terdampak signifikan, terutama pelaku usaha yang harus menghentikan kegiatan karena putusnya akses jalan, berdampak pada ekonomi kota. Penting bagi pemerintah daerah untuk mengembalikan ekonomi masyarakat pasca bencana alam terhadap daerah yang terkena bencana membutuhkan aliran dana untuk membangun kembali infrastruktur, meningkatkan daya beli masyarakat, dan mengembalikan keadaan seperti sebelum bencana banjir bandang.

Kerangka penanganan pascabencana berlandaskan UU No. 24/2007 yang menegaskan tiga mandat: rehabilitasi (pemulihan pelayanan publik), rekonstruksi (pembangunan kembali prasarana, sarana, dan kelembagaan), dan pemulihan (mengembalikan kondisi sosial-ekonomi melalui refungsionalisasi institusi dan infrastruktur). Tujuan operasionalnya adalah memperbaiki infrastruktur, memulihkan daya beli, dan mengembalikan aktivitas ekonomi ke kondisi pra-bencana, dengan perhatian khusus pada tantangan unik wilayah dan kelompok rentan (Wahyudi et al., 2024). Secara keseluruhan, upaya rehabilitasi dan rekonstruksi di wilayah terdampak bencana mencakup pembangunan kembali rumah warga serta perbaikan infrastruktur. Selain aspek fisik, pemulihan ekonomi masyarakat yang terkena dampak juga menjadi prioritas yang harus diperhatikan oleh pemerintah kota. Strategi pemerintah Kota Padang Panjang dalam pemulihan ekonomi pasca bencana banjir bandang.

Banjir bandang telah mengubah ekonomi Kota Padang Panjang. Jalan nasional Padang-Bukittinggi terputus, sehingga kota ini tidak bisa berfungsi sebagai kota transit. Ibu Yusmaili dari BPBD mengatakan, "jalan terputus total... ekonomi kota singgah ini terhenti," dan ini berdampak pada banyak sektor. Ibu Dewi Suryani dari KSB melihat usaha menurun tajam: "pedagang tutup... UMKM yang bergantung pada jalan tidak bisa berdagang," yang menyebabkan pemutusan kerja sementara. Dari sisi ekonomi daerah, Bapak Dewangga dari Setdako mencatat penurunan PAD di bawah target, gangguan pada 21 hektare lahan pertanian, dan penurunan penjualan UMKM, meskipun pemerintah sudah memberikan

bantuan dan mengadakan festival UMKM akhir 2024. Secara keseluruhan, ini menunjukkan perlunya strategi pemulihan yang terencana memulihkan konektivitas dan layanan dasar, memperbaiki aset produktif, dan agar ekonomi pulih cepat dan merata.

Penelitian ini membahas dampak ekonomi setelah bencana di Kota Padang Panjang. Kota ini adalah kota transit yang bergantung pada perdagangan dan jasa di jalur Padang–Bukittinggi. Dampak utama yang ditemukan adalah turunnya pendapatan rumah tangga, terutama bagi pedagang dan penyedia jasa. Selain itu, target Pendapatan Asli Daerah (PAD) 2024 tidak tercapai karena melemahnya basis pajak dan retribusi. Situasi ini memerlukan strategi pemulihan yang terarah dan berbasis data dari Pemerintah Kota. Tujuannya adalah memulihkan konektivitas, meningkatkan permintaan, dan menstabilkan usaha lokal. Penelitian ini bertujuan menganalisis strategi pemulihan ekonomi Pemerintah Kota Padang Panjang setelah banjir bandang dan mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi strategi tersebut. Pertanyaan yang dijawab adalah: (1) bagaimana strategi pemulihan ekonomi yang diambil oleh Pemerintah Kota Padang Panjang setelah banjir bandang, dan (2) faktor-faktor apa yang mempengaruhi implementasi strategi.

TINJAUAN PUSTAKA

Strategi merupakan proses penentuan rencana para pemimpin puncak yang berfokus pada tujuan jangka panjang organisasi, disertai penyusunan suatu cara atau upaya bagaimana agar tujuan tersebut dapat dicapai. Menurut Andrew (2011), strategi adalah pola keputusan yang menentukan dan mengungkapkan sadaran, maksud atau tujuan dan menghasilkan suatu kebijakan serta merencanakan untuk pencapaian tujuan serta memperinci apa yang ingin dicapai. Dalam strategi terdapat manajemen strategi yaitu tahapan untuk mencapai tujuan strategi tersebut.

Manajemen strategi yang dikemukakan oleh Fred R David (2017) dalam bukunya *Management Strategik*, menjelaskan manajemen strategi memiliki tiga tahapan yaitu : perumusan strategi, implementasi strategi, evaluasi strategi. Perumusan Strategi merupakan kegiatan untuk mengembangkan visi dan misi organisasi, mengidentifikasi peluang dan ancaman eksternal organisasi, menentukan kekuatan dan kelemahan internal organisasi, menetapkan tujuan jangka panjang organisasi, membuat sejumlah strategi alternatif untuk organisasi, serta memilih strategi tertentu untuk digunakan. Implementasi strategi mencakup penciptaan struktur organisasi yang efektif, pengarahan usaha, pengembangan dari pelaksanaan strategi tersebut. Evaluasi strategi menjadi tinjauan kembali yang menjadi dasar penyusunan strategi yang sedang dijalankan kemudian mengukur hasil kinerja serta mengambil langkah langkah perbaikan.

Strategi pelaksanaannya dipengaruhi oleh faktor implementasi dari strategi. George Edwards III dalam buku formulasi dan implementasi kebijakan publik kepemimpinan dan perilaku birokrasi oleh Yulianto Kadji, menjelaskan ada empat faktor dalam implementasi kebijakan untuk strategi diantaranya : pertama, komunikasi merupakan penyampaikan secara jelas dan akurat, jika komunikasi dapat tersampaikan dengan baik maka strategi dapat berjalan dengan efektif. Kedua, Sumber daya yang kompeten dan relevan dengan strategi yang dijalankan menjadi langkah keberhasilan implementasi kebijakan untuk mencapai

strategi. Ketiga, Sikap Pelaksana (Disposisi) menekankan bahwa karakteristik menentukan hasil dari implementasi suatu strategi, implementor program yang paling penting memiliki komitmen yang tinggi dan jujur akan senantiasa bertahan antara hambatan yang ditemui dalam kebijakan. Keempat, struktur birokrasi berperan penting dalam keberhasilan pelaksanaan kebijakan atau program dari strategi.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dan pendekatan deskriptif yang bertujuan untuk melakukan penelusuran, deskripsi dan analisis tentang strategi pemerintah Kota Padang Panjang dalam pemulihan ekonomi pasca bencana banjir bandang. Adapun yang menjadi fokus pada penelitian ini adalah Pertama, strategi Pemerintah Kota Padang Panjang dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi pasca bencana banjir bandang. Kedua, pelaksanaan strategi Pemerintah Kota Padang Panjang dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi pasca bencana banjir bandang. Pada penelitian ini, peneliti mengambil lokasi penelitian di Kota Padang Panjang untuk melihat Strategi Pemerintah Kota Padang Panjang dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi pasca bencana banjir bandang.

Penelitian ini melibatkan 16 informan yang dipilih secara purposif karena relevan dengan kebutuhan data: (1) Bappeda, Kepala Bidang Perekonomian yaitu 1 orang; (2) Balai Kota/Setda, Bagian Perekonomian Kota Padang Panjang 2 orang; (3) Dinas Perdagangan, Koperasi, dan UMKM yaitu 2 orang, (4) BPBD, Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi adalah 1 orang; (5) Kelompok Siaga Bencana (KSB), ketua KSB Kelurahan Silaing Bawah ; serta (6) masyarakat berjumlah 3 orang. Penelitian ini menggunakan sumber data primer dan sekunder. Adapun sumber data primer diperoleh dari melakukan wawancara dengan narasumber yang telah ditetapkan. Sedangkan, sumber data sekunder dapat diperoleh melalui berbagai sumber, seperti dokumen, publikasi resmi pemerintah, analisis industri oleh media, situs web, dan sumber daring lainnya. Teknik pengumpulan data didapatkan melalui wawancara mendalam dengan narasumber dan dokumentasi. Untuk menguji keabsahan data yang diperoleh, maka dalam penelitian ini menggunakan teknik triangulasi sumber. Selanjutnya, data dianalisis melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan Kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Strategi Pemerintah Kota Padang Panjang Dalam Pemulihan Ekonomi Pasca Bencana Banjir Bandang

Strategi pemerintah dalam pemulihan ekonomi pasca bencana merupakan langkah terencana dan berkesinambungan untuk mengembalikan kondisi sosial ekonomi masyarakat agar dapat berfungsi secara normal bahkan lebih baik dari sebelum bencana. Strategi pemerintah Kota Padang Panjang dalam pemulihan ekonomi pasca bencana banjir bandang berfokus pada langkah langkah strategis yang diambil oleh pemerintah daerah yang menggambarkan strategi Pemerintah Kota Padang Panjang dalam upaya pemulihan ekonomi masyarakat pasca bencana banjir bandang. Secara umum, Pemerintah Kota Padang Panjang

menunjukkan respon yang cukup cepat dalam menanggulangi dampak ekonomi akibat bencana, dengan mengedepankan koordinasi lintas perangkat daerah seperti Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), Dinas Perdagangan, dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD). Upaya pemulihan difokuskan pada pemberdayaan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), pemulihan aktivitas perdagangan, serta penataan kembali sarana dan prasarana ekonomi yang terdampak.

Berdasarkan teori manajemen strategi Fred R. David (2017), proses strategi dapat dikaji melalui tiga tahapan utama, yaitu perumusan strategi, implementasi strategi, dan evaluasi strategi. Ketiga tahapan ini menjadi kerangka analisis untuk melihat sejauh mana Pemerintah Kota Padang Panjang merancang dan melaksanakan upaya pemulihan ekonomi pasca bencana banjir bandang. Penjelasan dari teori tersebut yaitu:

a. Perumusan Strategi

Perumusan strategi merupakan tahap awal dalam proses manajemen strategi menurut Fred R. David (2017). Pada tahap ini, organisasi atau pemerintah daerah berfokus pada menentukan arah dan langkah strategis yang akan diambil untuk mencapai tujuan tertentu. Tahap ini untuk mengembangkan tujuan utama, mengidentifikasi peluang dan ancaman eksternal, menentukan kekuatan dan kelemahan internal organisasi, menetapkan tujuan jangka panjang, membuat sejumlah strategi alternatif untuk organisasi, serta memilih strategi tertentu untuk digunakan.

Berdasarkan wawancara dengan Ibu Yusmaili dan Bapak Chandra Erfiko, dan Bapak Fadhli Arifman dapat dipahami bahwa pemulihan ekonomi memiliki tujuan utama yang dibuat jelas dalam alur strateginya. Langkah awal yang dilakukan pemerintah adalah melakukan pemetaan terhadap dampak ekonomi yang ditimbulkan oleh bencana banjir bandang. Berdasarkan hasil pendataan yang dilakukan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dan Setdako, Bappeda sektor yang paling terdampak adalah sektor perdagangan, usaha mikro kecil dan menengah (UMKM).

Pemerintah Kota Padang panjang memiliki dukungan kelembagaan yang kuat, koordinasi antar instansi yang cukup baik, serta adanya komitmen dari daerah untuk mempercepat pemulihan ekonomi. Walaupun ada kendala pasca bencana yaitu keterbatasan akses dan distribusi menjadi terhambat atau telambat. Pemerintah melakukan upaya dalam jangka waktu yang cukup lama agar pemulihan ekonomi bisa segera membaik serta melakukan alternatif sementara agar ekonomi tidak turun secara signifikan.

Temuan ini menunjukkan bahwa perumusan strategi yang dilakukan oleh pemerintah Kota Padang Panjang sudah mampu mengidentifikasi tujuan utama pemulihan ekonomi, menganalisis peluang dan ancaman eksternal, serta menilai kekuatan dan kelemahan internal daerah sebagai dasar penyusunan strategi. Meskipun terdapat hambatan seperti keterbatasan akses distribusi bantuan dan lambatnya proses pemulihan di beberapa sektor, pemerintah tetap berupaya menjalankan berbagai alternatif strategi sementara agar perekonomian masyarakat tidak mengalami penurunan yang signifikan.

b. Pelaksanaan atau Implementasi Strategi

Pelaksanaan atau implementasi strategi merupakan tahap di mana strategi yang telah dirumuskan diterjemahkan ke dalam tindakan nyata. N. Mamonto (2018) menyatakan bahwa implementasi merupakan proses dinamis di mana pelaksanaan kebijakan melakukan aktivitas atau kegiatan yang nyata dalam rangka mewujudkan tujuan dari kebijakan tersebut (Ismail Sumampouw dan Gustaf Undap Novan Mamoto et al., 2018). Tahap ini mencakup pengalokasian sumber daya, penetapan kebijakan, koordinasi lintas sektor, serta pelaksanaan program yang telah direncanakan untuk mencapai tujuan strategis organisasi. Dalam konteks Pemerintah Kota Padang Panjang, pelaksanaan strategi difokuskan pada pemulihan ekonomi masyarakat pasca bencana banjir bandang melalui kerja sama antarinstansi, pelibatan masyarakat, serta dukungan kebijakan yang terintegrasi.

Hasil wawancara menunjukkan langkah pertama dalam pelaksanaan strategi adalah memperkuat koordinasi antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) serta lembaga terkait. Pemerintah Kota Padang Panjang melibatkan Bappeda, BPBD, Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM, serta Setdako dalam pelaksanaan program pemulihan ekonomi berdasarkan dari pendapat masyarakat. Koordinasi ini dilakukan untuk memastikan agar program yang dijalankan memiliki arah yang sama dan tidak tumpang tindih antar instansi. Pemerintah juga menjalin sinergi dengan pemerintah provinsi dan lembaga keuangan guna mendapatkan dukungan anggaran tambahan, terutama untuk sektor UMKM dan mobilitas agar ekonomi bisa berjalan kembali.

Setelah dilakukan koordinasi, diluncurkan program untuk pemulihan ekonomi diantaranya : bantuan, operasi pasar murah, pemulihan infrastruktur, subsidi bunga, dan stabilisasi harga. Pelaksanaan strategi juga didukung dengan pengalokasian anggaran yang bersumber dari APBD Kota Padang Panjang, serta bantuan dari pemerintah provinsi dan pusat. Pemerintah berupaya menyalurkan dana secara tepat sasaran dengan memperhatikan tingkat kerusakan dan kebutuhan masyarakat. Pemerintah juga mengerahkan sumber daya manusia lintas instansi, baik dari aparat pemerintah maupun relawan masyarakat, untuk mempercepat pelaksanaan program di lapangan. Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan strategi Pemerintah Kota Padang Panjang dalam pemulihan ekonomi pasca bencana banjir bandang telah berjalan melalui koordinasi yang baik antar instansi dan dukungan program nyata bagi masyarakat. Pemerintah tidak hanya fokus hanya dalam jangka pendek tapi berusaha agar program bisa berlanjut dengan seterusnya.

c. Evaluasi Strategi

Evaluasi strategi merupakan tahap akhir dalam proses manajemen strategi yang bertujuan untuk menilai sejauh mana strategi yang telah dilaksanakan mampu mencapai tujuan yang ditetapkan. Tahap ini mencakup kegiatan pemantauan (monitoring), penilaian kinerja program, serta tindakan korektif (perbaikan strategi) apabila ditemukan ketidaksesuaian antara perencanaan dan hasil di lapangan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Yusmaili dari BPBD dan Ibu Rika Fitria Hasti dari Setdako, dan Ibu Ria Maulina dari Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM diketahui bahwa kegiatan evaluasi ini dilakukan untuk menilai efektivitas pelaksanaan

program, kesesuaian sasaran penerima bantuan, serta kendala yang dihadapi selama pelaksanaan. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa sebagian besar program berjalan sesuai rencana, meskipun terdapat beberapa hambatan teknis di lapangan.

Program bantuan dinilai efektif dalam membantu pelaku usaha kecil untuk kembali beroperasi. Banyak pelaku UMKM yang mulai membuka kembali usahanya setelah menerima bantuan modal. Program operasi pasar murah mampu menekan lonjakan harga kebutuhan pokok dan meringankan beban masyarakat. Namun, pelaksanaannya masih perlu diperluas agar menjangkau seluruh kelurahan terdampak, karena beberapa wilayah belum mendapatkan kesempatan yang sama. Program subsidi bunga yang awalnya sedikit peminat di lakukanlah evaluasi agar banyak UMKM terlibat dengan bantuan tersebut dengan memberikan penuh bantuan pembayaran bunga.

Faktor faktor yang mempengaruhi strategi pemerintah dalam melaksanakan pemulihan ekonomi Kota Padang Panjang pasca bencana banjir bandang

Beberapa faktor yang dikemukakan oleh George Edwards III mengenai implementasi kebijakan atau program dan faktor yang menjadi penghambat implementasi strategi pemerintah dalam pemulihan ekonomi. Beberapa faktor yang mempengaruhi strategi pemerintah dalam melaksanakan pemulihan ekonomi Kota Padang Panjang pasca bencana banjir bandang, sebagai berikut:

a. Faktor Komunikasi

Koordinasi antar instansi pemerintah menjadi faktor kunci dalam keberhasilan pelaksanaan strategi pemulihan ekonomi pasca bencana. Pemerintah Kota Padang Panjang melalui BPBD berperan sebagai lembaga koordinatif yang menjembatani kerja sama antara Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM, Bappeda, serta Setdako. Sinergi yang terbangun ini membuat proses pemulihan berjalan lebih terarah, sistematis, dan menyeluruh. Melalui mekanisme seperti Kelompok Siaga Bencana (KSB) di tiap kelurahan dan Tim Kajian Pasca Bencana (Jitupasna), BPBD mampu mengumpulkan informasi lapangan dengan cepat dan akurat. Data yang diperoleh kemudian menjadi dasar perumusan kebijakan dan prioritas program pemulihan ekonomi. Selain itu, koordinasi lintas instansi juga memastikan bahwa setiap kebijakan yang diterapkan tidak tumpang tindih dan dapat menyesuaikan kebutuhan masyarakat di lapangan.

b. Faktor Sumber Daya

1) Dukungan Anggaran

Dukungan anggaran merupakan pondasi utama dalam memastikan strategi pemulihan ekonomi dapat dijalankan dengan efektif. Pemerintah Kota Padang Panjang mendapatkan alokasi dana dari berbagai sumber, yaitu dari pemerintah pusat, provinsi, dan daerah. Dana tersebut digunakan untuk mendukung berbagai program. Berdasarkan hasil wawancara, diketahui bahwa pemerintah daerah mengelola anggaran secara optimal dengan memastikan setiap rupiah digunakan sesuai rencana program yang telah disusun bersama OPD terkait. Dukungan ini tidak hanya bersifat finansial, tetapi juga dalam bentuk bantuan logistik dan bahan pangan dari pemerintah pusat dan provinsi, yang

membantu menstabilkan kondisi ekonomi masyarakat segera setelah bencana. Dukungan anggaran dari berbagai tingkat pemerintahan menjadi faktor pendorong utama dalam implementasi strategi pemulihan ekonomi. Pengelolaan dana yang terarah dan transparan memungkinkan setiap program dapat dijalankan secara efektif dan tepat sasaran.

2) Kompetensi Sumber Daya Manusia

Kompetensi SDM berperan penting dalam menentukan efektivitas pelaksanaan strategi pemulihan ekonomi. Pemerintah Kota Padang Panjang berupaya memaksimalkan potensi pegawai yang ada, baik di BPBD, Setdako, Bappeda, maupun dinas terkait lainnya. Meskipun jumlah dan kapasitas SDM terbatas, pemerintah mampu mengelola dengan baik melalui pembagian peran yang jelas, koordinasi yang aktif, dan keterlibatan langsung di lapangan. Para aparatur yang menangani bidang ekonomi dan administrasi bencana bekerja sama untuk memastikan bahwa program pemulihan berjalan sesuai target. Namun, sempat terjadi peralihan kepemimpinan di tingkat kepala daerah, namun hal tersebut tidak menjadi hambatan berarti karena SDM yang ada telah siap secara profesional untuk melanjutkan program yang telah dirancang.

c. *Faktor Sikap Pelaksana*

Sikap pelaksana atau disposisi merupakan faktor penting dalam keberhasilan implementasi kebijakan publik, termasuk dalam pelaksanaan program pemulihan ekonomi pasca bencana banjir bandang di Kota Padang Panjang. Disposisi pelaksana mencerminkan komitmen, tanggung jawab, dan kesediaan aparatur untuk melaksanakan kebijakan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Rika Fitria Hasti, selaku Kepala Sub Bagian Perekonomian Setdako Padang Panjang, diperoleh keterangan bahwa seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) menunjukkan kesungguhan dalam menjalankan program mereka masing-masing. Pemerintah daerah melalui BPBD dan instansi terkait juga menunjukkan respon cepat terhadap keluhan masyarakat, terutama dalam proses pemulihan ekonomi pasca bencana. Hal serupa juga diungkapkan oleh Ibu Yusmaili, selaku Kepala Rehabilitasi dan Rekonstruksi BPBD Kota Padang Panjang. Beliau menjelaskan bahwa seluruh pihak bekerja keras membantu masyarakat secara langsung di lapangan. Meskipun pada saat itu terjadi peralihan kepemimpinan di pemerintah kota, para pelaksana tetap berusaha menjaga rasa aman dan memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat terdampak.

Temuan tersebut menunjukkan bahwa para pelaksana kebijakan di Kota Padang Panjang memiliki disposisi yang baik, yang ditandai dengan komitmen tinggi, tanggung jawab, serta rasa kepedulian terhadap masyarakat. Meskipun terdapat tantangan berupa keterbatasan sumber daya dan masa transisi pemerintahan, para pelaksana tetap mampu menjalankan tugasnya dengan optimal. Hal ini menunjukkan bahwa faktor sikap pelaksana memiliki pengaruh signifikan terhadap kelancaran program pemulihan ekonomi, karena dengan adanya komitmen dan integritas yang tinggi dari para aparatur, kebijakan dapat diterapkan secara efektif dan menyentuh kebutuhan masyarakat secara langsung.

d. Faktor Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi berperan penting dalam menentukan efektivitas pelaksanaan kebijakan publik. Struktur yang jelas dan terkoordinasi memungkinkan kebijakan berjalan secara sistematis, efisien, dan sesuai dengan prosedur yang berlaku. Dalam konteks pemulihan ekonomi pasca bencana banjir bandang di Kota Padang Panjang, struktur birokrasi melibatkan beberapa instansi utama seperti Bappeda, Setdako, Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM, serta BPBD. Keempat lembaga ini memiliki peran koordinatif dalam merancang, mengawasi, dan melaksanakan program pemulihan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Chandra Erfiko, selaku Analis Perekonomian Setdako, dijelaskan bahwa koordinasi antar instansi berjalan cukup baik meskipun terdapat kendala lapangan seperti kerusakan jalan dan sulitnya akses menuju wilayah terdampak. Meskipun begitu, kerja sama lintas instansi tetap dilakukan untuk mempercepat perbaikan infrastruktur dan memulihkan aktivitas ekonomi masyarakat. Selain itu, Bapak Fadhli Arifman selaku Analis Perencana Bappeda, menambahkan bahwa pihaknya berusaha meningkatkan koordinasi teknis agar perencanaan ke depan lebih matang dan kesiapsiagaan terhadap bencana dapat lebih baik. Upaya ini dilakukan agar proses pemulihan tidak hanya bersifat reaktif tetapi juga preventif terhadap potensi bencana serupa di masa depan.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat disimpulkan bahwa struktur birokrasi di Kota Padang Panjang telah berjalan secara efektif, terutama dalam aspek koordinasi antar instansi. Dengan demikian, birokrasi yang responsif dan adaptif akan menjadi faktor penting dalam keberhasilan pemulihan ekonomi pasca bencana.

e. Faktor Penghambat Implementasi Strategi

1) Ketergantungan Sosial dari Masyarakat

Salah satu tantangan yang dihadapi Pemerintah Kota Padang Panjang dalam melaksanakan strategi pemulihan ekonomi pasca bencana banjir bandang adalah munculnya ketergantungan sosial di kalangan masyarakat. Ketergantungan sosial ini tercermin dari perilaku sebagian masyarakat yang masih berorientasi pada bantuan eksternal sebagai sumber utama untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka, bukan dari upaya dan inisiatif mandiri.

Hasil wawancara dengan Ibu Yusmaili, Kepala Rehabilitasi dan Rekonstruksi BPBD Kota Padang Panjang, menguatkan hal ini. Beliau menjelaskan bahwa terdapat sebagian masyarakat yang meskipun telah menerima bantuan berupa perbaikan rumah dan pemenuhan kebutuhan dasar, masih menunjukkan ketidakpuasan terhadap jumlah bantuan yang diberikan. Bahkan, sebagian kecil masyarakat masih mengeluh dan terus berharap bantuan tambahan tanpa adanya upaya untuk bangkit secara mandiri. Hal ini menunjukkan bahwa mental ketergantungan terhadap bantuan masih cukup kuat di kalangan tertentu.

Senada dengan itu, hasil wawancara dengan Ibu Ria Maulina, Analis Perdagangan Dinas Perdagangan, Koperasi, dan UKM, juga menggambarkan bahwa masih terdapat masyarakat yang enggan mengikuti program bantuan ekonomi yang disediakan

pemerintah karena menganggap prosedurnya rumit atau sulit dipahami. Padahal, program tersebut dirancang untuk membantu pelaku usaha kecil agar bisa pulih dan mandiri setelah bencana. Kurangnya pemahaman dan literasi terhadap tata cara program menyebabkan efektivitas kebijakan pemerintah tidak maksimal.

2) *Keterbatasan Akses*

Selain faktor sosial, keterbatasan akses distribusi bantuan juga menjadi salah satu hambatan utama dalam strategi pemulihan ekonomi pasca bencana banjir bandang di Kota Padang Panjang. Hambatan ini berkaitan dengan kondisi geografis, infrastruktur yang rusak, yang sempat terhambat di awal masa tanggap darurat. Ketika akses transportasi terganggu, maka distribusi bahan pokok, logistik, dan bantuan ekonomi tidak dapat berjalan optimal, sehingga berdampak langsung pada lambatnya proses pemulihan ekonomi masyarakat terdampak.

Hal ini sejalan dengan pernyataan Bapak Chandra Erfiko, Analis Perekonomian Setdako Padang Panjang, yang menyebutkan bahwa pasca bencana, pemerintah mengalami kesulitan besar dalam menyalurkan bantuan akibat akses jalan yang rusak parah dan jembatan yang terputus. Akibatnya, distribusi bantuan menjadi lambat dan membutuhkan waktu lebih lama dari yang direncanakan.

Kendala serupa juga disampaikan oleh Bapak Fadhli Arifman, Kepala Bidang Ekonomi, Sumber Daya Alam, dan Infrastruktur Bappeda Kota Padang Panjang, yang menjelaskan bahwa hambatan distribusi bantuan dan barang bantuan cukup signifikan pada awal masa pascabencana. Namun, pemerintah daerah berupaya mengatasinya dengan melakukan koordinasi lintas instansi dan percepatan perbaikan infrastruktur seperti jalan dan jembatan agar jalur distribusi kembali normal.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan temuan penelitian mengenai strategi pemerintah Kota Padang Panjang dalam pemulihan ekonomi pasca bencana banjir bandang, dapat disimpulkan bahwa strategi telah dilaksanakan melalui tiga tahapan menurut teori manajemen strategi Fred R. David: perumusan, implementasi, dan evaluasi. Pada perumusan strategi, pemerintah mengidentifikasi sektor terdampak dan menyusun langkah pemulihan berbasis data dari BPBD, Bappeda, dan Setdako, dengan memperhatikan kekuatan internal dan tantangan eksternal. Implementasi strategi dilakukan melalui koordinasi lintas instansi dengan program bantuan modal, operasi pasar murah, subsidi bunga, dan pemulihan infrastruktur, didukung anggaran APBD serta bantuan pemerintah pusat dan provinsi. Pada evaluasi, pemerintah menilai efektivitas program dan melakukan perbaikan berdasarkan pemantauan lapangan. Hasil menunjukkan program berjalan baik dalam mempercepat pemulihan, meski ada hambatan teknis dan keterbatasan penerima manfaat. Faktor yang memengaruhi strategi pemulihan ekonomi meliputi koordinasi antarinstansi yang baik, dukungan anggaran memadai, kompetensi SDM yang profesional, serta kendala ketergantungan masyarakat terhadap bantuan dan keterbatasan distribusi akibat kerusakan infrastruktur. Saran untuk pemerintah Kota Padang Panjang: memperkuat koordinasi antarinstansi, memperluas

program pemulihan ekonomi, meningkatkan edukasi untuk kemandirian ekonomi, mempermudah prosedur subsidi bunga, dan mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam program pemulihan usaha. Masyarakat perlu meningkatkan kemandirian melalui inovasi, kerja sama, dan peningkatan literasi ekonomi.

Saran

Pemerintah Kota Padang Panjang diharapkan memperluas cakupan program pemulihan ekonomi sehingga seluruh masyarakat dapat merasakan pemulihan ekonomi lebih banyak lagi. Masyarakat juga diharapkan berperan aktif dalam mengikuti program pemerintah, terutama dalam pemulihan, Upaya edukasi, pelatihan serta peningkatan literasi ekonomi perlu terus dilakukan untuk mendorong inovasi dari pemerintah maupun masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustina, Y., Septiany, P. R., Arlinda, & Safitri, K. (2020). Pembuatan keripik kelapa sebagai upaya pemulihan ekonomi pasca bencana di Kabupaten Lombok Utara. *Jurnal Karinov*, 3(2), 79–83.
- Creswell, J. W. (2021). *Research design: Pendekatan metode kualitatif, kuantitatif, dan campuran*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- David, F. R. (2017). *Strategic management* (13th ed.).
- Hakim, A. L., Hadiono, A., Mulyani, I., Jumanah, Sanjaya, N., & Destiana. (2022). Pemulihan ekonomi pasca bencana untuk masyarakat pesisir di Kabupaten Pandeglang. *Jurnal Ilmu Administrasi Negara ASIAN (Asosiasi Ilmuwan Administrasi Negara)*, 10(1), 367–373.
- Hasan, H. (2022). Pengembangan sistem informasi dokumentasi terpusat pada STMIK Tidore Mandiri. *Jurasik (Jurnal Sistem Informasi dan Komputer)*, 2(1), 23–29.
- Hasan, S. (2021). *Manajemen strategi*. Banyumas: Pena Persada.
- Husnullail, M., Risnita, Jailani, M. S., & Asbui. (2024). Teknik pemeriksaan keabsahan data dalam riset ilmiah. *Journal Genta Mulia*, 15(0), 1–23.
- Itu, Y., Dalima, V., & Bate, N. (2024). Strategi pemulihan ekonomi pasca bencana alam Seroja sebagai bentuk resiliensi. *Journal of Education Research*, 5(3), 2840–2847.
- Juliansyah, E. (2017). Strategi pengembangan sumber daya perusahaan dalam meningkatkan kinerja PDAM Kabupaten Sukabumi. *Jurnal Ekonomak*, 3(2), 19–37.
- Kasmira, Alyas, & Sudarmi. (2020). Strategi pemerintah dalam pembangunan infrastruktur jalan di Kabupaten Gowa. *Kajian Ilmiah Mahasiswa Administrasi Publik*, 1(3), 818–833.
- Kuesioner, W. D. A. N. (n.d.). Teknik pengumpulan data. *[Nama jurnal tidak tercantum]*, 3(1), 39–47.
- Muhammad, M. M. (2025). Model efektivitas keuangan dana darurat dalam mendorong pemulihan ekonomi warga Desa Ciherang pasca bencana alam gempa Cianjur. 7(1), 19–32.
- Muhardi, W. R. (2024). *Manajemen strategi*. Surabaya: Direktorat Penerbitan dan Publikasi Ilmiah Universitas Surabaya.

- Pahlevi, C., & Musa, M. I. (2023). *Manajemen strategi*. Makassar: Telektual Karya Nusantara.
- Purwastuti, I. (2019). Kecemasan masyarakat terhadap bencana banjir bandang di Desa Batuganda Kecamatan Lasusua Kabupaten Kolaka Utara. *Jurnal Mimbar Kesejahteraan Sosial, Edisi 2*, 1–10.
- Sugiyono. (2013). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Surokim. (2016). *Riset komunikasi: Buku pendamping bimbingan skripsi*. Pusat Kajian Komunikasi Publik Prodi Ilmu Komunikasi FISIB-UTM & Aspikom Jawa Timur.
- Wahyudi, A., Adi, K. M., Iswanto, P. N., & ... (2024). Pemulihan ekonomi Desa Sriti pasca bencana dengan pengembangan strategi pemasaran UMKM. *Journal of Global ...*, 2(3), 1383–1394.
- Yulianto Kadji. *Formulasi dan Implementasi Kebijakan Publik Kepemimpinan dan Perilaku Birokrasi dalam Fakta Realitas*. UNG Press Gorontalo.